

PROSES, KRITERIA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
REKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

TESIS

*Oleh:*

**MARNIATI**

05 202 036



PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

2008

**Proses, Kriteria dan Faktor yang Mempengaruhi Rekrutmen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Partai Politik di Kabupaten Pesisir Selatan**

**Oleh : Marniati**

**(Dibawah Bimbingan Dr. Erwin, MSi dan Drs. Bakaruddin RA, MS.)**

**Ringkasan**

Rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Partai politik dan gabungan partai politik diberi kewenangan oleh UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam melakukan rekrutmen terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum didaftarkan ke KPUD, sehingga calon yang didaftarkan bukan hanya dari kader-kader partai tapi juga calon yang berasal dari luar partai. Untuk menghasilkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas, diperlukan suatu proses rekrutmen yang baik yakni demokratis, dan transparan. Permasalahan utamanya adalah bagaimana proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik, mengidentifikasi kriteria yang digunakan serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses rekrutmen tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengumpulan data dokumentasi. Informan utamanya adalah pengurus partai politik dan gabungan partai politik. Untuk pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan data yang sudah ada dengan beberapa informan yang berbeda yakni calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendaftar ke

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Otonomi Daerah yang telah bergulir sejak kemerdekaan bangsa Indonesia mengalami perubahan dalam pelaksanaannya, demikian juga dengan kepemimpinan pemerintahan di Indonesia mengalami berbagai perubahan menuju demokrasi yang diharapkan.<sup>1</sup>

Adanya kebutuhan dan tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik yaitu pemerintahan yang demokratis, kuat dan efektif, merupakan faktor utama terjadinya perubahan dalam kepemimpinan, karena pemerintahan yang baik akan dapat terwujud apabila ditopang dengan sistem kepemimpinan yang baik.

Seiring dengan kecenderungan tuntutan organisasi untuk lebih mampu mengakomodir kebutuhan dan aspirasi anggotanya, tuntutan kepemimpinan akan cenderung mengarah pada pengembangan kualitas kepemimpinan yang demokratis, kuat dan efektif dengan ciri-ciri yang menonjol, antara lain visi, misi, nilai, keberanian, integritas dan harmoni.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan sebuah kepemimpinan yang demokratis, kuat, efektif, dan juga responsif haruslah melalui suatu proses yang juga demokratis, artinya kepemimpinan yang demokratis akan lahir apabila proses rekrutmen pemimpin itu juga dilakukan secara demokratis dan transparan. Secara formal UU No. 32 tahun

---

<sup>1</sup> Suradinata, Ermaya. *Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan dalam Politik dan Bisnis*. Suara Bebas. Jakarta, 2006. hal v

<sup>2</sup> *Ibid.* hal 125

2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka peluang bagi sistem pemilihan kepala daerah yang demokratis sehingga masyarakat dapat memilih langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dianggap mampu memimpin daerahnya serta dapat mengerti dan memahami kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, telah diatur mengenai pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Rakyat dapat memilih langsung calon yang diinginkan dan dianggap mampu memimpin daerahnya.

Menurut Djohan (2003), Pemilihan langsung akan menutup peluang bagi pencalonan kepala daerah yang tidak dikehendaki oleh masyarakat daerah, yang tidak dikenal track record-nya, lebih menjamin akuntabilitas pemerintah daerah, dan lebih kuatnya derajat legitimasi kepala daerah, sehingga pada akhirnya akan membuahkan pemerintah daerah yang lebih efektif.<sup>3</sup> Disini berarti terbuka peluang bagi calon perseorangan yang bukan anggota atau kader partai.

Namun sebelum masyarakat secara langsung memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, UU No. 32 tahun 2004 telah memberikan kewenangan kepada partai politik untuk memproses bakal calon tersebut sebelum ditetapkan menjadi calon yang akan dipilih oleh masyarakat. Jadi, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dipilih oleh rakyat adalah orang pilihan yang telah melalui proses seleksi di tingkat partai politik. Namun demikian, calon yang

---

<sup>3</sup> Suradinata *Op.cit.* hal 200

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, mengidentifikasi kriteria yang digunakan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan didaftarkan ke KPUD pada Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama sesuai dengan tujuan penelitian; pertama proses, kedua kriteria, dan ketiga faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen tersebut.

Dilihat dari prosesnya, rekrutmen dilakukan melalui proses formal dan informal. Proses formal dilakukan melalui beberapa tahapan, sedangkan proses informal dilakukan melalui pendekatan atau lobi-lobi antara partai politik atau gabungan partai politik dengan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Proses informal yang dilakukan juga ada yang prosesnya panjang dan ada proses pendek atau dadakan dimana hubungan antara partai dengan calon baru terjalin bersamaan dengan proses Pilkada akan dimulai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Dr.MA. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: dari pengertian sampai penulisan laporan*. Laboratorium Sosiologi Fisip Unand. Padang.
- Arikunto, 1990. Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta
- Budiardjo, Miriam, 2005. *Dasar – dasar Ilmu Politik*. Gramedia Jakarta.
- Djohan, Djohermansyah. 2003. *Kebijakan Otonomi Daerah 1999*. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Fitriyah, 2005. *Sistem dan Proses Pemiliha Kepala Daerah secara Langsung dalam Jurnal Analisis CSIS Vol. 34 No. 3 September 2005*
- Gaffar, Afan. 1989. *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*. Rajawali. Jakarta.
- Harahap, H. Abdul Asri, Drs.Ir. 2005. *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*. Cidesindo. Jakarta.
- Haris, Syamsudin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai. Proses nominasi dan seleksi calon legislatif Pemilu 2004*. Gramedia. Jakarta.
- Hayik, Abdul, dkk. 2006. *Konsolidasi Demokrasi Kompilasi hasil Workshop, Pertemuan Kerja Rutin dan Pertemuan Nasional Forum Politisi*. Forum Politisi. Jakarta.
- Irawan, Prasetya. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian*. STIA-LAN. Jakarta
- Karim, Abdul Gaffar. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Riyanto, Yatim, *Metode Penelitian Pendidikan*, SIC, Surabaya